

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 17 Juli 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.com	Kamis, 16 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Selesaikan Perbaikan Tujuh Fasum di Jayapura dan Wamena	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Ditjen Cipta Karya mendukung percepatan pemulihan kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jayapura dan Wamena pasca aksi massa yang terjadi pada 29 Agustus 2019 lalu. Perbaikan fasilitas umum (fasum) yang meliputi gedung pemerintahan, pasar serta fasilitas pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI Jokowi. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/284024/kementerian-pupr-ri-selesaikan-perbaikan-tujuh-fasum-di-jayapura-dan-wamena
2	Timesindonesia.com	Kamis, 16 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Siapkan Tiga Langkah Penanganan Darurat Banjir Bandang Luwu Utara	Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono pada Kamis (16/7/2020) meninjau lokasi banjir bandang yang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat upaya Kementerian PUPR RI bersama tim gabungan dalam penanganan darurat akibat bencana tersebut. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/283969/kementerian-pupr-ri-siapkan-tiga-langkah-penanganan-darurat-banjir-bandang-luwu-utara
3	Antaranews.com	Kamis, 16 Juli 2020	Labuan Bajo diyakini cepat tumbuh dibanding objek wisata lain	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini bahwa Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mampu didorong untuk pemulihan ekonomi saat mulai diterapkan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. https://www.antaranews.com/berita/1615226/labuan-bajo-diyakini-cepat-tumbuh-dibanding-objek-wisata-lain
4	Antaranews.com	Kamis, 16 Juli 2020	Penarikan iuran Tapera bakal molor, aturan operasional belum rampung	Kementerian PUPR menyebut penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa molor jika dasar operasional belum rampung. https://www.antaranews.com/berita/1615010/penarikan-iuran-tapera-bakal-molor-aturan-operasional-belum-rampung
5	Cnnindonesia.com	Jumat, 17 Juli 2020	Pungutan Tapera Terancam Mundur Sampai Aturan Rampung	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menyebut pungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diundur jika dasar operasional belum rampung. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200716204616-532-525662/pungutan-tapera-terancam-mundur-sampai-aturan-rampung
6	Cnnindonesia.com	Jumat, 17 Juli 2020	Pemerintah Kucurkan Rp2,59 T Bantu Pesantren Terdampak Corona	Pemerintah memberikan bantuan senilai Rp2,59 triliun untuk membantu sejumlah pondok pesantren di Indonesia akibat pandemi covid-19. Bantuan tersebut nantinya disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp2,38 triliun dan bantuan pembelajaran daring selama tiga bulan sejumlah Rp211,73 miliar. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200716201426-532-525651/pemerintah-kucurkan-rp259-t-bantu-pesantren-terdampak-corona

7	Beritasatu.com	Kamis, 16 Juli 2020	2021, Kempupera Tetap Berikan Subsidi Rumah Bagi MBR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) memastikan bahwa anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terus dilaksanakan, meski sudah ada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). https://www.beritasatu.com/lingkungan/656275/2021-kempupera-tetap-berikan-subsidi-rumah-bagi-mbr
8	Investor.co.id	Kamis, 16 Juli 2020	Kementerian PUPR Harusnya Ganti Nama Kementerian Infrastruktur	Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menilai nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mestinya berganti menjadi Kementerian Infrastruktur. https://investor.id/business/kementerian-pupr-harusnya-ganti-nama-kementerian-infrastruktur
9	Sindonews.com	Jumat, 17 Juli 2020	Kementerian PUPR akan Rampungkan Pembangunan Bendungan Cipanas Tahun 2022	Diharapkan bisa mendukung ketahanan air dan pangan nasional, Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang akan dipercepat penyelesaian pembangunannya. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan Bendungan Cipanas, belum lama ini. https://nasional.sindonews.com/read/103790/94/kementerian-pupr-akan-rampungkan-pembangunan-bendungan-cipanas-tahun-2022-1594940854
10	Radarbangsa.com	Kamis, 16 Juli 2020	Dukung Pemulihan Ekonomi, PUPR Lakukan Penataan Kawasan Army Dock	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Pemerintah fokus pada dua hal yakni percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. https://www.radarbangsa.com/news/25914/dukung-pemulihan-ekonomi-pupr-lakukan-penataan-kawasan-army-dock
11	Bisnis Indonesia, halaman 6	Jumat, 17 Juli 2020	Program Tapera Diprediksi Mundur dari Jadwal	Pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diperkirakan mundur dari jadwal semula pada awal tahun depan seiring dengan belum ada aturan pendukung yang diterbitkan.
12	Kompas, halaman 10	Jumat, 17 Juli 2020	Target 500.000 Unit Selama 2020-2024	Pemerintah menargetkan intervensi untuk pembiayaan rumah layak huni mencapai 5 juta unit selama tahun 2020-2024. Dari itu, penyaluran pembiayaan melalui Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditargetkan mencapai 500.000 unit atau sekitar 10 persen.
13	Kompas, halaman 15	Jumat, 17 Juli 2020	Material Banjir Hambat Bantuan	Timbunan material sisa banjir bandang setebal 1-4 meter di sejumlah wilayah di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menyulitkan gerak bantuan dan pencarian korban hilang serta evakuasi. Material yang menutup akses ke sejumlah wilayah, termasuk jalur Trans-Sulawesi, menjadi kendala dalam distribusi logistik yang sangat dibutuhkan warga.

Judul	Program Tapera Diprediksi Mundur dari Jadwal	Tanggal	Jumat, 17 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 6		
Resume	Pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diperkirakan mundur dari jadwal semula pada awal tahun depan seiring dengan belum ada aturan pendukung yang diterbitkan.		

| PEMBIAYAAN PERUMAHAN |

Program Tapera Diprediksi Mundur dari Jadwal

Bisnis, JAKARTA — Pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diperkirakan mundur dari jadwal semula pada awal tahun depan seiring dengan belum ada aturan pendukung yang diterbitkan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pengumpulan dana simpanan peserta yang awalnya dimulai pada Januari 2021, bisa saja mundur.

“Program ini bisa saja mundur dari jadwal tahun depan karena dasar-dasar operasionalnya belum terpenuhi, aturan pendukungnya,” ujarnya dalam diskusi Tapera secara daring, Kamis (16/7).

Rencananya, kutipan iuran dana simpanan sebesar 3% setiap bulannya yang terdiri atas perusahaan atau pemberi kerja harus menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%. Nantinya, iuran itu dipotong langsung dari gaji atau upah bulanan yang didapat.

Awalnya, iuran dimulai dari iuran peserta pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Tahap selanjutnya, peserta lainnya yaitu

BUMN, BUMD, BUMDes hingga pekerja swasta dan mandiri.

Saat ini, dia menghitung masih terdapat aturan pendukung yang belum ada terdiri atas amanat Peraturan Presiden (Perpres), sebanyak 10 amanat dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), dan sebanyak 13 amanat dalam peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Terdapat dua dari sebanyak 10 Permen yang sedang dalam proses penyelesaian adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Tim Likuidasi dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Taperum PNS. Aturan lainnya yang harus dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, dan sebagainya.

“Kalau ini selesai tahun ini, maka pada 2021 nanti Tapera bisa beroperasi tetapi kalau dasar operasional ini belum ada, maka itu tidak bisa dijalankan Taperanya tahun depan,” katanya.

Saat ini, BP Tapera mengerjakan tiga tugas utama secara paralel

sebelum masuk ke pekerjaan rumah keempat pada 2021. Tiga tugas tersebut yakni likuidasi dana Taperum ke Tapera, lalu pendataan PNS, TNI dan Polri yang akan dialihkan ke program Tapera, dan masalah pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Penyiapan pengalihan dana FLPP dan sebagainya. Hal itu dilakukan secara paralel sampai dengan 5 bulan ke depan sebelum Tapera beroperasi,” ucap Eko.

LANGKAH SMF

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyediakan dana kredit pemilikan rumah (KPR) jangka panjang lewat dua skema yakni sekuritisasi dan *refinancing* untuk mendukung program Tapera.

“Kami hadir untuk meminimalisir *missmatch* yang dilakukan pihak penyalur KPR seperti perbankan. Sumber kita berasal pertama *capital injection* dari pemerintah, penambahan modal negara. Kemudian kita juga aktif mengeluarkan surat utang di pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Dia menuturkan SMF dalam program Tapera hanya bisa menyentuh sisi permintaan yakni pembiayaan perumahan untuk para debitur.

“Karena kita sekunder, kita tidak bisa langsung ke primer. Jadi dana yang dihasilkan *mostly* disalurkan ke perbankan yang fokus di KPR yang ada di *demand side*. Kalau Tapera kan bisa ke *supply side*,” katanya.

SMF juga melayani pasar menengah bawah untuk bisa mendapatkan dana pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, SMF sebagai *special mission vehicle* Kementerian Keuangan juga *fiscal tools*-nya pemerintah.

Sepanjang tahun ini, penyaluran FLPP 2020 ditargetkan mencapai Rp3,7 triliun untuk 102.000 rumah. Hingga 3 Juli 2020, realisasinya mencapai 75.000 rumah.

Ananta mengusulkan melalui mekanisme pemupukan Tapera dapat menanamkan dana yang dimilikinya pada efek yang diterbitkan oleh SMF. Dana tersebut digunakan SMF untuk penyaluran KPR program seperti KPR ASN, TNI/POLRI non MBR ataupun KPR komersial. (Yanita Petriella)

Judul	Target 500.000 Unit Selama 2020-2024	Tanggal	Jumat, 17 Juli 2020
Media	Kompas, halaman 10		
Resume	Pemerintah menargetkan intervensi untuk pembiayaan rumah layak huni mencapai 5 juta unit selama tahun 2020-2024. Dari itu, penyaluran pembiayaan melalui Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditargetkan mencapai 500.000 unit atau sekitar 10 persen.		

TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Target 500.000 Unit Selama 2020-2024

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan intervensi untuk pembiayaan rumah layak huni mencapai 5 juta unit selama tahun 2020-2024. Dari jumlah itu, penyaluran pembiayaan melalui Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditargetkan mencapai 500.000 unit atau sekitar 10 persen.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko D Heripoerwanto, dalam webinar "Tapera=Affordable Housing?" yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat, Kamis (16/7/2020), menyatakan, pemerintah tetap melakukan intervensi untuk mendorong keterjangkauan rumah layak huni.

Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak diharapkan mencapai 70 persen, naik dibandingkan situasi tahun 2019 yang 56,75 persen. Target intervensi pembiayaan 5 juta rumah itu meliputi skema subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi uang muka sejumlah 900.000 unit.

Selain itu, juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan 68.000-100.000 unit dan kontribusi dari PT Sarana Multigriya finansial sejumlah 50.000 unit. Juga kolaborasi pemerintah dan masyarakat 3,45 juta unit serta Tapera 500.000 unit.

Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Junaidi Abdillah berpendapat, dana yang dihimpun ke dalam Tapera merupakan kekuatan dahsyat untuk pembiayaan perumahan. Namun, target peruntukan Tapera untuk pembiayaan 500.000 unit rumah hingga 2024 dinilai tergolong kecil.

Sementara Ketua DPP Real Estat Indonesia Totok Lusida berpendapat, instrumen pembiayaan perumahan yang tumpang-tindih membuat program bantuan pembiayaan perumahan jadi tak efektif. Selain itu, juga terjadi pengeluaran ganda yang bisa membebani pekerja dan perusahaan. Karena itu, pihaknya meminta seluruh instrumen pembiayaan perumahan dilebur ke Tapera, antara lain skema pembiayaan dari Asabri, Taspen, dan BPJS Tenaga Kerja. (LKT)

Judul	Material Banjir Hambat Bantuan	Tanggal	Jumat, 17 Juli 2020
Media	Kompas, halaman 15		
Resume	Timbunan material sisa banjir bandang setebal 1-4 meter di sejumlah wilayah di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menyulitkan gerak bantuan dan pencarian korban hilang serta evakuasi. Material yang menutup akses ke sejumlah wilayah, termasuk jalur Trans-Sulawesi, menjadi kendala dalam distribusi logistik yang sangat dibutuhkan warga.		

Material Banjir Hambat Bantuan

Material banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menimbun jalan-jalan, termasuk Trans-Sulawesi. Pencarian korban dan distribusi logistik pun terhambat.

MAKASSAR, KOMPAS — Timbunan material sisa banjir bandang setebal 1-4 meter di sejumlah wilayah di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menyulitkan gerak bantuan dan pencarian korban hilang serta evakuasi. Material yang menutup akses ke sejumlah wilayah, termasuk jalur Trans-Sulawesi, menjadi kendala dalam distribusi logistik yang sangat dibutuhkan warga.

Kamis (16/7/2020), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninjau lokasi yang Senin (13/7) malam lalu diterjang banjir bandang. Tiga langkah awal jadi prioritas, yakni mencari warga hilang, membersihkan material banjir, dan menyiapkan hunian sementara.

"Alat-alat berat sudah diturunkan untuk membersihkan material. Kami juga segera membangun hunian sementara bagi warga karena umumnya mereka trauma kembali ke lokasi rumah. Semua sudah dilaporkan kepada Menteri PU. Kami berharap pemulihan bisa segera dilakukan," kata Nurdin di Masamba, Luwu Utara.

Menurut data Kantor Basarnas Makassar, hingga Kamis petang, total 30 warga ditemukan meninggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara menyebut lebih dari 60 orang hilang berdasarkan

laporan keluarga yang masuk ke posko. Hingga kini masih banyak dusun yang nyaris rata tertimbun material dan sulit dijangkau tim pencari dan evakuasi.

Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Muslim Muchtar mengatakan, saat ini fokus utama tim SAR dan BPBD adalah mencari warga hilang dan mengevakuasi korban. Prioritas lain adalah membuka akses ke daerah-daerah terisolasi yang terdampak parah. Akses Trans-Sulawesi yang lumpuh juga akan dibuka.

"Pembersihan jalur Sulawesi ini untuk memudahkan akses distribusi logistik. Saat ini logistik merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk masyarakat, terutama pengungsi. Ada 39 titik pengungsian dan 20 di antaranya disiapkan pemerintah," kata Muslim.

Alternatif roda dua

Menurut Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, sembari menunggu pembukaan akses, distribusi bantuan sebagian akan menggunakan jalur alternatif dengan kendaraan roda dua. "Sejumlah wilayah sulit dijangkau karena jembatan beton ataupun jembatan gantung putus. Jalan juga tertimbun material. Jadi, akan dicari jalur alternatif di pegunungan yang bisa diakses kendaraan roda dua," tutur Indah.

Selain alat berat untuk membuka jalur, saat ini sanitasi portabel sangat dibutuhkan karena sebagian besar infrastruktur rusak, termasuk sanitasi warga. Aliran listrik pun belum pulih dan masih sering dipadamkan.

Kalimantan Tengah

Di Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, ribuan rumah terendam banjir. Masyarakat terdampak bencana enggan dievakuasi ke posko darurat.

Telah dua minggu lebih, banjir di dua kabupaten itu tidak surut. Di Kotawaringin Barat, tiga kecamatan terendam hingga tiga meter, yakni Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, dan Kotawaringin Lama.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan BPBD Kotawaringin Barat Reneli menjelaskan, warga memilih tinggal di rumah. "Mereka bikin tempat khusus di dalam rumah dengan ketinggian tertentu," katanya. Setidaknya 1.564 keluarga terdampak dan 1.523 rumah terendam air.

Banjir di Kabupaten Lamandau, 530 kilometer dari Kota Palangkaraya, memasuki Nanga Bulik, ibu kota kabupaten itu. "Belum pernah masuk banjir kota ini, tidak separah ini. Ada 21 ruas jalan tertutup aksesnya," kata Kepala Pelaksana BPBD Lamandau Edison Dewel. (REN/IDO)